



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

JL. Belimbing No.10 Kerten, Laweyan Telp. (0271) 643050 Fax (0271) 636265

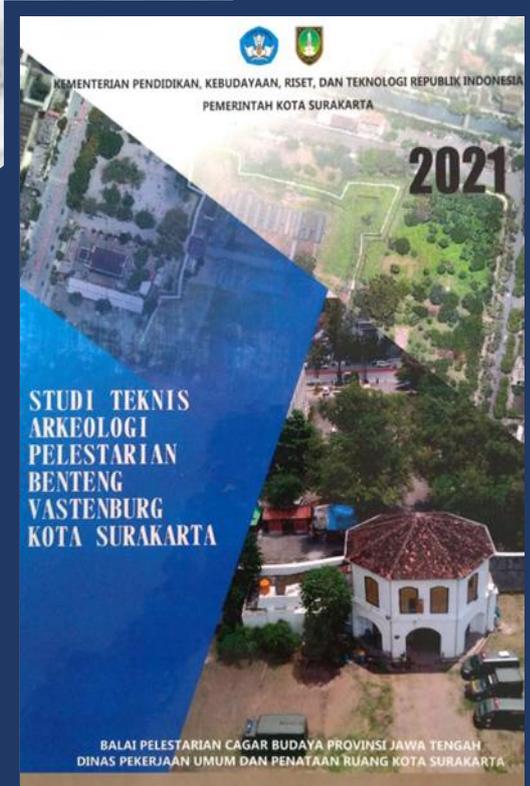
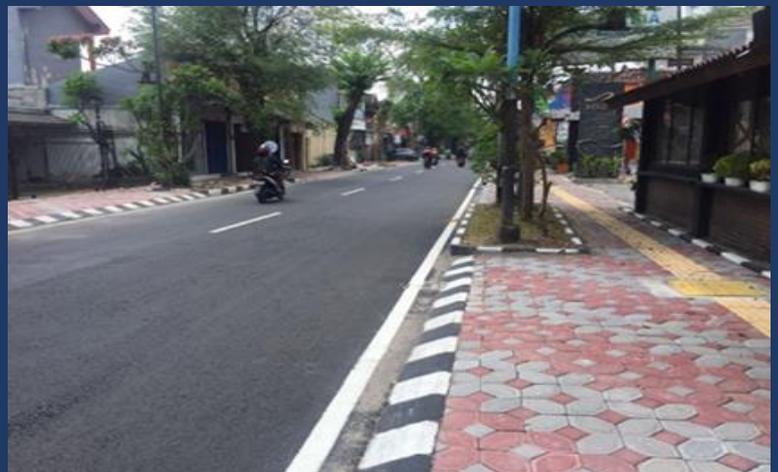
Email : dpupr@surakarta.go.id / surakarta_dpu@yahoo.com

SURAKARTA 57143

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TAHUN ANGGARAN 2021



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan salah satu komponen dari prinsip "*good governance*" sebagai persyaratan bagi setiap instansi dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tahun 2020 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta kepada semua pihak yang berkepentingan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ungkapan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dan menjadi umpan balik bagi peningkatan kinerja di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 31 Januari 2022

**KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA SURAKARTA**



NUR BASUKI, ST
Pembina

NIP. 19690915 199803 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Secara garis besar program yang diemban dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta, adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, Program Penataan Bangunan Gedung, Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, Program Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota surakarta secara berkelanjutan.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 156.559.905.730,- Anggaran tersebut untuk menjalankan 9 sasaran strategis, 13 program, 22 kegiatan, 47 sub kegiatan dan dilaksanakan oleh sekretariat dan 5 (lima) bidang. Alokasi anggaran itu digunakan untuk mendukung terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya. Sebagian besar alokasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diimplementasikan untuk belanja modal (54%), yakni untuk pembangunan fisik infrastruktur yang dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat.

Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun anggaran 2021 dilaporkan melalui Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Tahun 2021. LkjIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi walikota Surakarta dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Walikota Surakarta sesuai tugas dan fungsi yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja untuk tahun pertama Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tahun 2021–2026 sekaligus tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021– 2026.

Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diukur dan didapatkan dari 9 sasaran dengan 3 indikator Kinerja Utama dan 11 Indikator Kinerja Kunci. Sasaran yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diantaranya:

1. Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan
2. Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat
3. Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Limbah Bagi masyarakat
4. Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air
5. Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung
6. Meningkatnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
7. Meningkatnya kualitas jasa konstruksi
8. Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang
9. Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien

Indikator Kinerja Utama terkait urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diantaranya:

1. Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik, dengan realisasi sebesar 87,95% dari target tahun 2021 sebesar 87,61% (deviasi +0,34%)
2. Cakupan Layanan Air Bersih dengan realisasi sebesar 94,57% dari target tahun 2021 sebesar 100% (deviasi -5,43%)

3. Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik dengan capaian sebesar 97,20% dari target tahun 2021 sebesar 100% (deviasi -2,8%)

Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta untuk mendukung tercapainya sasaran, diantaranya:

1. Tingkat Kemantapan Jalan Kota dengan capaian sebesar 88,64% dari target tahun 2021 sebesar 90,05% (deviasi -1,41%)
2. Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik, dengan capaian sebesar 92,96% dari target tahun 2021 sebesar 91%, (deviasi +1,96%)
3. Persentase Panjang Drainase Kondisi Baik, dengan capaian sebesar 81,82% dari target tahun 2021 sebesar 81,3% (deviasi +0,52%)
4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan perpipaaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga, dengan capaian sebesar 94,57% dari target tahun 2021 sebesar 100%, (deviasi -5,43%)
5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestic, dengan capaian sebesar 97,20% dari target tahun 2021 sebesar 100% (deviasi -2,8%)
6. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota, dengan capaian sebesar 96,40% dari target tahun 2021 sebesar 96,30% (deviasi +0,1%)
7. Rasio Kepatuhan IMB, dengan capaian sebesar 36% dari target tahun 2021 sebesar 36% (deviasi 0)
8. Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya, dengan capaian sebesar 9% dari target tahun 2021 sebesar 9% (deviasi 0)
9. Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi, dengan capaian sebesar 15% dari target tahun 2021 sebesar 16,67% (deviasi -1,67%)
10. Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang, dengan capaian sebesar 100% dari target tahun 2021 sebesar 100% (deviasi 0)
11. Nilai PMPRB, dengan capaian sebesar 18,38 dari target tahun 2021 sebesar 18,3% (deviasi +0,08%)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
1. Susunan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	2
2. Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	5
B. Fungsi Strategis Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10
C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
A. Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah	18
1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021	18
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026	19
B. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Tahun 2021	21
C. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Tahun 2021	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2021	43
A. Capaian Kinerja Organisasi	43

1. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terhadap RPJMD Tahun 2016-2021	43
2. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021 terhadap RPJMD Tahun 2021-2026	46
3. Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terhadap RPJMD Tahun 2021-2026	48
4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terhadap target RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026	49
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	50
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terhadap target RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2021-2026	51
B. Realisasi Anggaran	60
 BAB IV PENUTUP	 69
A. Kesimpulan	69
B. Strategi Peningkatan Kinerja	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021	4
Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021	4
Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021	5
Tabel 1.4. Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021.....	6
Tabel 1.5. Permasalahan/hambatan dalam mencapai indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021	12
Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021	18
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026.....	19
Tabel 2.3. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021	21
Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021	22
Tabel 2.5. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021.....	25
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021 terhadap RPJMD Tahun 2016-2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	43
Tabel 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap RPJMD Tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	46

Tabel 3.3. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 terhadap RPJMD 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	48
Tabel 3.4. Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta	3
Gambar 3.1.	Peningkatan Jalan Joko Tingkir	53
Gambar 3.2.	Peningkatan Jalan Duwet ruas 127	53
Gambar 3.3.	Peningkatan Jalan Perintis Kemerdekaan	53
Gambar 3.4.	Peningkatan Jalan Ki Hajar Dewantoro	53
Gambar 3.5.	Peningkatan Jalan Jaya Wijaya	53
Gambar 3.6.	Peningkatan Jalan Setia Budi	53
Gambar 3.7.	Peningkatan Jalan Juanda	54
Gambar 3.8.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	54
Gambar 3.9.	Pembangunan Jembatan Ketandan	54
Gambar 3.10.	Pembangunan Jembatan Jonasan	54
Gambar 3.11.	Pembangunan Saluran Drainase Primer Sumber	54
Gambar 3.12.	Pembangunan Talud Kali Makam Bergolo	54
Gambar 3.13.	Pembangunan Talud Kedung Jumbleng	55
Gambar 3.14.	Perbaikan Talud Kali Toklo	55
Gambar 3.15.	Pembangunan Talud Saluran Stadion Mini	55
Gambar 3.16.	Pembangunan Saluran Jl. S. Parman dan Kawasan Sekitarnya	55
Gambar 3.17.	Peningkatan Saluran Jl. Kebangkitan Nasional	55
Gambar 3.18.	Peningkatan Saluran Jl. Bromo dan Kawasan sekitarnya	55
Gambar 3.19.	Pembangunan Saluran Jl. MT. Haryono	56
Gambar 3.20.	Normalisasi Saluran	56
Gambar 3.21.	Penyusunan Masterplan Ducting Utilitas	58
Gambar 3.22.	Pengadaan Peta Dasar dan Peta Tematik	58
Gambar 3.23.	Penyusunan Studi Teknis Arkeologi Pelestarian Situs Astana Oetara	59
Gambar 3.24.	Penyusunan Studi Teknis Arkeologi Pelestarian Benteng Vastenburg	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta merupakan dinas daerah dengan Tipe B yang menjalankan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam menjalankan urusannya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait sumber daya air (SDA), air minum, air limbah, drainase, bangunan gedung; penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang;
5. Pelaksanaan kesekretariatan dinas terkait perencanaan dan penganggaran, administrasi dan umum, serta organisasi dan kepegawaian; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

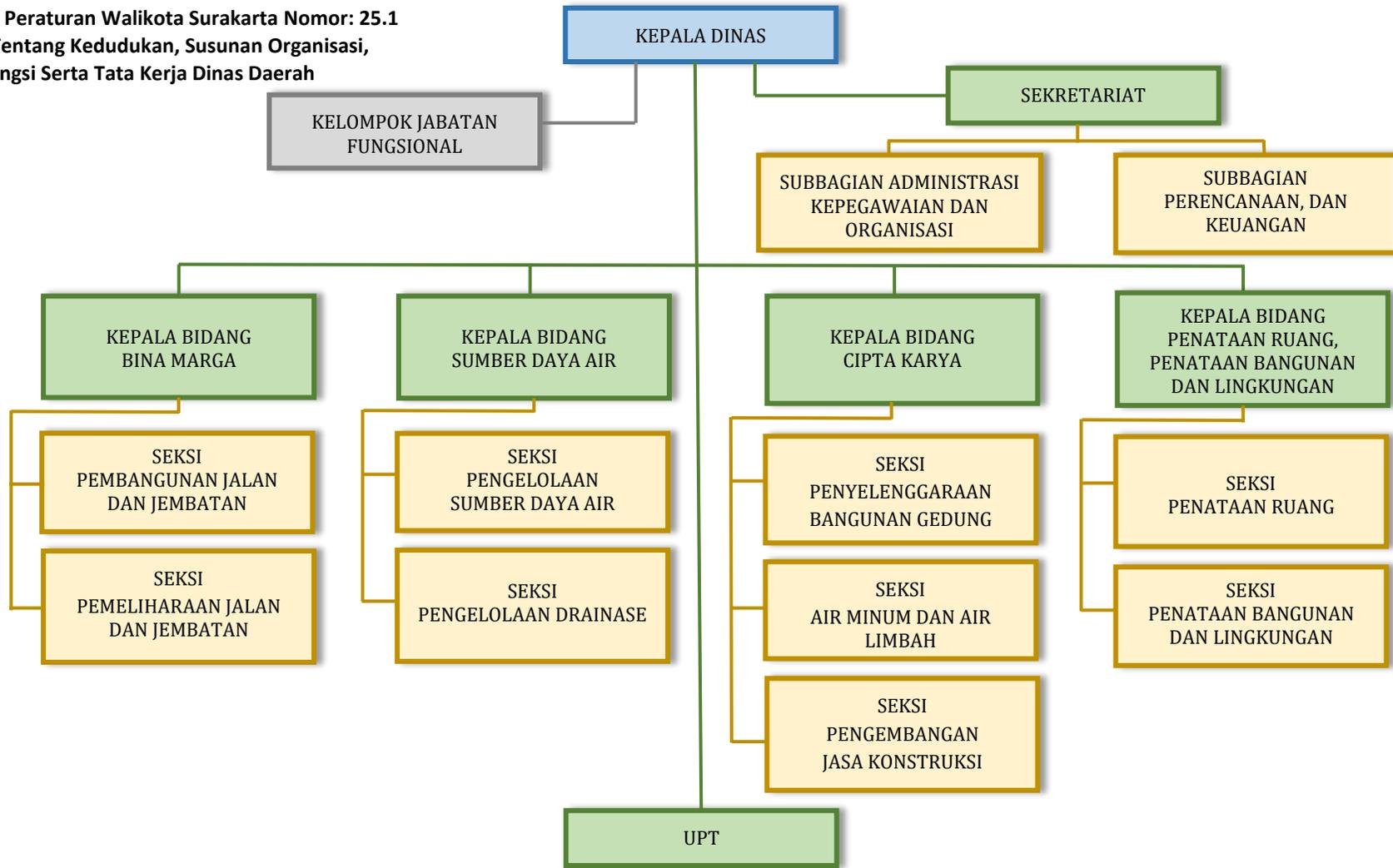
Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Susunan Kepegawaian dan Sarana Prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Susunan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta adalah sebagai berikut;

- a. Kepala Dinas, yang membawahkan :
 - Sekretariat
 - Bidang Bina Marga
 - Bidang Sumber Daya Air
 - Bidang Cipta Karya
 - Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi.
- c. Bidang Bina Marga
 - Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 - Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- d. Bidang Sumber Daya Air
 - Seksi Pengelolaan Drainase; dan
 - Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air.
- e. Bidang Cipta Karya
 - Seksi Air Minum dan Air Limbah;
 - Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan
 - Seksi Pengembangan Jasa Konstruksi.
- f. Bidang Penataan Ruang, Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Seksi Penataan Ruang;
 - Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungannya
- g. UPT
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan; Peraturan Walikota Surakarta Nomor: 25.1 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah



Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terdiri atas Sekretariat dan Bidang-Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data Bulan Desember tahun 2021, dalam melaksanakan kegiatan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 82 personil PNS dan 86 personil TKPK, dengan data pegawai seperti pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	5	-	-	-	5
2	SMA Sederajat	20	5	60	-	85
3	D1	-	-	1	-	1
4	D3	3	1	4	2	10
5	S1	27	13	8	11	59
6	S2	4	4	-	-	8
7	S3	-	-	-	-	-
JUMLAH						168

Dari 82 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dapat dirinci jumlah pegawai berdasarkan golongan sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun 2021

No	Golongan		L	P	Jumlah
1	Golongan II	II/a	1	-	25
		II/b	6	-	

		II/c	1	1	
		II/d	14	2	
2	Golongan III	III/a	14	9	50
		III/b	8	4	
		III/c	2	4	
		III/d	7	2	
3	Golongan IV	IV/a	4	2	7
		IV/b	1	-	
		IV/c	-	-	
JUMLAH					82

Tabel 1.3

*Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun 2021*

NO	DATA PEGAWAI	JUMLAH
1	Jabatan Struktural	
	Eselon II	-
	Eselon III	4
	Eselon IV	13
2	Staf	65
3	TKPK	86
Jumlah Total Pegawai		168

2. Aset, Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Berdasarkan Data Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021, Aset, Sarana dan Prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut ;

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun 2021

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	519
A	ALAT BESAR	39
1	Crawler Excavator + Attachment	4
2	Dump Truck	4
3	Macadan Roller/Three Wheel Roler	2
4	Tandam Roller	4
5	Stamper	1
6	Concrete Cutter	1
7	Concrete Breaker	1
8	Truck Loader + Attachment	1
9	Wheel Loader + Attachment	1
10	Portable Generating Set	12
11	Portable Water Pump	7
12	Stationary Water Pump	1
B	KOMPUTER	120
1	Local Area Network (LAN)	1
2	P.C Unit	30
3	Lap Top	19
4	Note Book	29
5	Personal Komputer lainnya	3
6	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1
7	Computer Compatible	1
8	Monitor	4
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	27
10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1
11	Peralatan Personal Komputer lainnya	4
C	ALAT EKSPLORASI	4
1	<i>Distance Meter Electronic</i>	4

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
D	ALAT ANGKUTAN	42
1	Station Wagon	2
2	Truck + Attachment	4
3	Pick Up	11
4	Sepeda Motor	23
5	Gerobak Tarik	2
E	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	23
1	Mesin Gergaji Logam	1
2	Mesin Kompresor	2
3	Mesin Las Listrik	2
4	Mesin Gergaji	2
5	Gergaji Chain Saw	4
6	Perkakas bengkel service lainnya (dst)	1
7	Tanggem	3
8	Mesin Blower Listrik / Mekanik	2
9	alat ukur lain-lain lainnya (dst)	6
F	ALAT PERTANIAN	4
1	Penyemprot Tangan (<i>Hand Sprayer</i>)	4
G	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	235
1	Mesin Ketik Listrik	1
2	Mesin Fotocopy Folio	1
3	Mesin Fotocopy Lainnya	1
4	Lemari Besi/Metal	17
5	Rak Besi	39
6	Filing Cabinet Besi	4
7	Lemari Kaca	1
8	CCTV - Camera Control Television System	2
9	Alat Penghancur Kertas	1
10	Mesin Absensi	2
11	<i>Overhead Projector</i>	3
12	Panel Pameran	2

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
13	Alat Pengaman / Sinyal	3
14	LCD Projector/Infocus	1
15	Meja Kerja Besi/Metal	2
16	Meja Rapat	2
17	Meja Resepsionis	1
18	Meja 1/2 Biro	9
19	Kursi Putar	10
20	Bangku Tunggu	8
21	Partisi	8
22	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2
23	Mesin Pemotong Rumput	2
24	A.C. Window	17
25	A.C. Split	12
26	Treng Air/Tandon Air	1
27	Televisi	5
28	Sound System	2
29	Wireless	2
30	Unit Power Supply	1
31	Camera Video	5
32	Camera film	6
33	Tangga Aluminium	1
34	Handy Cam	4
35	Tangga	1
36	Alat Pemadam/Portable	8
37	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1
39	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1
40	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	8

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
44	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	1
45	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2
46	Buffet Kaca	2
47	Lemari Arsip Pejabat lainnya	2
H	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	32
1	<i>Professional Sound System</i>	2
2	<i>Digital Audio Taperecorder</i>	2
3	Video Monitor	1
4	Camera Film	1
5	Camera Digital	1
6	Video Conference	1
7	Contact Printer	2
8	Coordinatograph	5
9	Theodolite (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2
10	Rambu/Bak Ukur	2
11	Alat Studio Pemetaan lainnya	1
12	Telephone Mobile	1
13	<i>Handy Talky (HT)</i>	8
14	Facsimile	1
15	Unit Tranceiver VHF Portable	2
I	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6
1	Alat Kedokteran umum lainnya	6
J	ALAT LABORATORIUM	14
1	<i>Hand Extraction</i>	2
2	alat laboratorium fisika lainnya (dst)	1
3	<i>Infrared Lamp</i>	6
4	Corrosion Tester (<i>NonDestructive Test (ndt) Device</i>)	1
5	peralatan umum lainnya (dst)	4
	TOTAL	519

B. Fungsi Strategis Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam melaksanakan tugasnya dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan sebagian kewenangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mempunyai Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta 2021-2026 yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Kota Surakarta dan merupakan landasan serta pedoman bagi DPUPR Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2021–2026. Dimana tahun 2021 merupakan tahun transisi dari Rencana Strategis tahun 2016-2021 menuju Rencana Strategis 2021-2026. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Walikota Surakarta.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2021-2026. Di samping itu pula, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta telah melalui tahapan-tahapan yang selaras dengan proses penyusunan RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta termuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Diskusi Kelompok Terbatas (DKT), Pokok-pokok Pikiran Dewan, Prioritas Pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional, serta mempertimbangkan unsur-unsur penanggulangan kemiskinan dan tujuan *SDG's (Sustainable Development Goals)* untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis tentu perlu ditunjang dengan Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi Walikota Kota Surakarta sebagai berikut.

**“Mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit,
Kreatif, dan Sejahtera”**

Sedangkan Misi Walikota Surakarta yang ditetapkan dalam mencapai visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan;
2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olah raga;
5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan;
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif;
7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mengarah pada pencapaian unsur visi: Mewujudkan Surakarta

sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera. Adapun misi Walikota Surakarta yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta adalah misi ke-3, yaitu: **Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan** dengan tujuan misi **Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan Tangguh**, dan sasaran misi **meningkatkan kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya**. Dimana sasaran misi ke-3 Walikota Surakarta yang telah tercantum dalam RPJMD 2021-2026 tersebut menjadi tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.

C. Permasalahan Utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam mencapai kinerjanya sesuai indikator dan target yang telah ditentukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang banyak menemui hambatan /permasalahan, seperti halnya sebagai berikut:

Tabel 1.5.

*Permasalahan/hambatan dalam mencapai indikator kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021*

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
1	Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala kondisi eksisting dan ketersediaan lahan dalam penyelesaian penyelenggaraan jalan - Belum terbebasnya lahan yang terdampak dalam pelaksanaan pekerjaan
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala keberadaan jaringan air minum, Jaringan Kabel Listrik, Jaringan Telekomunikasi (Fiber Optik), vegetasi dll

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
			<ul style="list-style-type: none"> - Faktor Cuaca yang mempengaruhi jalannya penyelesaian pekerjaan - Terkendala proses lelang karena proses persiapan yang membutuhkan waktu lebih lama - Adanya refocusing anggaran
		Persentase Panjang Drainase Kondisi Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya <i>crossing utilitas</i> jaringan sanitasi air limbah, air bersih, telekomunikasi yang mengurangi penampang basah saluran - Umur konstruksi yang membutuhkan rehabilitasi - Adanya refocusing anggaran
2	<p>Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Minum masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Air Bagi</p>	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan perpipaaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala kelembagaan (pengelolaan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD dan BUMD) - Terkendala keterbatasan Anggaran - Terkendala data dukung merupakan data komposit dan belum ada data pilah - Terkendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum - Untuk mencapai akses aman terkendala kondisi elevasi yg tidak memadai antara sumber air ke daerah layanan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
3	<p>Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Limbah masyarakat Air Bagi</p>	<p>Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terkendala kelembagaan (pengelolaan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD dan BUMD) - Terkendala keterbatasan Anggaran - Terkendala data dukung merupakan data komposit dan belum ada data pilah - Terkendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah - Untuk mencapai akses aman limbah terkendala kondisi elevasi yg tidak memadai antara daerah tangkapan dengan IPAL - Sosialisasi dan redistribusi yang tidak bisa di ikuti oleh CPM (<i>Critical Path Method</i>) yaitu teknik menganalisis jaringan kegiatan/aktivitas-aktivitas ketika menjalankan proyek dalam rangka memprediksi durasi total
4	<p>Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air</p>	<p>Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya <i>crossing utilitas</i> jaringan sanitasi air limbah, air bersih, telekomunikasi yang mengurangi penampang basah saluran - Adanya penutupan saluran yang masih dan sampah serta sedimentasi pada

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
		kewenangan kabupaten/kota	<p>saluran yang mengakibatkan terjadinya genangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Semakin berkurangnya daerah resapan air - Fenomena perubahan air (intensitas curah hujan yang tinggi dalam waktu yang singkat) - Adanya refocusing anggaran
5	Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	Rasio Kepatuhan IMB	<ul style="list-style-type: none"> - Regulasi dan peraturan perundang-undangan yang baru mengenai IMB yang sekarang digantikan dengan PBG sehingga diperlukan penyesuaian dan kebijakan baru terkait pelaksanaannya
6	Meningkatnya penyelenggaraan penantaan bangunan dan lingkungan	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi adanya permasalahan nonteknis terkait lahan yang ditata cukup besar sehingga membutuhkan pengadaan lahan
7	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> - Data tenaga kerja konstruksi yang sesuai dengan kota tempat pelatihan cukup sulit di dapat
8	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakkan Hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
	<p>pengendalian tata ruang</p>	<p>Terhadap Rencana Tata Ruang</p>	<p>belum terlaksana dengan tegas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Penyusunan RDTR yang baru akan terlaksana pada tahun anggaran berikutnya - Adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berpengaruh terhadap kesesuaian pemanfaatan ruang - Belum ada komitmen untuk melaksanakan Insentif (untuk wilayah yang akan didorong pertumbuhannya, dan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR) dan Disinsentif (untuk wilayah yang kendalikan pertumbuhannya serta untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR) - Pelaksanaan Diskresi oleh forum BKPRD yang belum optimal rutin dilaksanakan - Pelibatan TACB dan TABG yang belum optimal dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang
9	<p>Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja</p>	<p>Nilai PMPRB</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Manajemen perubahan (belum ada rencana kerja, komitmen dan sosialisasi)

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kunci	Permasalahan/Hambatan yang dihadapi dalam mencapai indikator
	<p>OPD agar Efektif dan Efisien</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Deregulasi Kebijakan (harmonisasi terhadap kebijakan belum optimal) - Penataan dan Penguatan Organisasi (evaluasi kelembagaan, tindak lanjut evaluasi, organisasi belum berbasis kinerja) - Penataan Tatalaksana (Belum melakukan pemetaan proses bisnis dan SOP serta penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP) - Penataan Sistem Manajemen SDM (Belum dilakukan pengembangan kompetensi) - Penguatan Akuntabilitas (Pengelolaan akuntabilitas kinerja belum optimal) - Adanya refocusing anggaran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator kinerja Utama Perangkat Daerah

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021 dan juga termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021, Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diantaranya seperti pada table berikut;

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan RPJMD Tahun 2016-2021

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target Renstra (2016-2021)
1	Meningkatnya sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	$(\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik}) / (\text{Panjang Jalan Kota Seluruhnya}) \times 100 \%$	87,05%
		Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik	$(\text{Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik}) / (\text{Panjang Jembatan Kota Seluruhnya}) \times 100 \%$	90%
		Persentase Panjang Drainase/Saluran Pembuangan Air dalam Kondisi Baik	$(\text{Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik}) / (\text{Panjang Saluran Drainase Seluruhnya}) \times 100 \%$	79,70%
2	Meningkatnya luasan bebas banjir dan genangan	Persentase Luasan Wilayah Bebas Banjir dan Genangan	$(\text{Luas Wilayah Bebas Banjir Dan Genangan}) / (\text{Luas Wilayah}) \times 100\%$	98%

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target Renstra (2016-2021)
3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas ruang publik	Persentase penambahan ruang publik yang ditata	$(\text{jumlah luas ruang publik yang ditata}) / (\text{jumlah luas ruang publik keseluruhan}) \times 100 \%$	100%
4	Tersedianya sarana dan prasarana umum di Kawasan industri ekonomi kreatif	Persentase kluster ekonomi dengan prasarana umum kondisi baik	$(\text{jumlah kluster ekonomi kreatif yang ditata}) / (\text{jumlah kluster ekonomi kreatif seluruh kota}) \times 100 \%$	28%

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2021

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 dan juga termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta diantaranya seperti pada table berikut;

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan RPJMD Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Renstra (2021-2026)
1	Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan	Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	$\text{Tingkat Kemantapan Jalan Kota} + \text{Persentase Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik} + \text{Persentase Drainase Kondisi Baik}$ dibagi 3	87,61%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Renstra (2021-2026)
		Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap dibagi Jumlah Total Panjang Jalan Kota dikali 100%	90,05%
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah Total Panjang Jembatan Kota dikali 100%	91 %
		Persentase Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik	Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik dibagi Jumlah total Panjang Drainase Kota dikali 100%	81,3 %
2	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan perpipaaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan dan bukan perpipaaan terlindungi dibagi total proyeksi rumah tangga dikali 100%	100 %
3	Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Limbah Air Bagi masyarakat	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk +jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT+Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagi jumlah rumah dikali 100 %	100 %

B. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Tahun 2021

Tabel 2.3.

*Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun 2021*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan kualitas Infrastruktur Perkotaan Kondisi Baik	Persentase Wilayah Bebas Banjir dan Genangan yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai kewenangan kab/kota	97,24%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	100,0%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	100,00%
		Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kota	90,65%
		Persentase panjang jaringan Jembatan dalam Kondisi baik	91,6%
		Persentase panjang Drainase Kondisi Baik	86,74%
		Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	20%
		2	Meningkatkan penataan ruang, bangunan gedung, serta bangunan dan lingkungannya
Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	27%		
Rasio Kepatuhan IMB	37%		
3	Meningkatkan Kualitas Implementasi	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renja	2 Dokumen
		Presentase Ketersediaan Data dan Informasi	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan		

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Tahun 2021

Tabel 2.4.

*Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun 2021*

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
I	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	90,05%
		Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	91%
		Persentase panjang drainase/ saluran pembuangan air dalam kondisi baik	81,7%
1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Panjang turap/talud/bronjong dalam kondisi baik	42595,18 m
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Jumlah dokumen rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	1 dokumen
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah dokumen SPM	1 dokumen

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan)	Panjang drainase kondisi baik	400393,25 m
5	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan kondisi baik	193,08 km
		Panjang Jembatan kondisi baik	117 buah
		Panjang Jalan yang terpelihara dengan baik	193,08 km
		Panjang Jembatan yang terpelihara dengan baik	117 buah
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	20 orang
		Jumlah dokumen standar satuan harga yang tersusun	1 dokumen
7	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Titik PJU yang direhabilitasi	850 unit
		Tagihan rekening listrik PJU	1 tahun
II	Meningkatnya luasan daerah bebas banjir dan genangan	Persentase wilayah bebas banjir dan genangan	99%
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (sub kegiatan Operasi Pemeliharaan Sistem Drainase)	Persentase wilayah bebas banjir dan genangan	99%
III	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik	Persentase penambahan luasan ruang publik yang ditata	100%

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	59,30%
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase ruang publik dalam kondisi baik	100%
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian IMB dengan Implementasi	40%
		Persentase kesesuaian KRK dengan implementasi KRK	40%
		Persentase bangunan pada masing-masing kelurahan yang terdata	100%
		Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta Rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Digital	100%
		Persentase Kawasan yang memiliki RTRK/RTBL	100%
4	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase pemanfaatan lahan pada masing-masing kecamatan yang terdata	100%
IV	Meningkatkan Kualitas Implementasi Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Kinerja Pembangunan	Nilai Sakip OPD	65,78 Nilai
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan : renstra dan renja	2 dok
		Persentase ketersediaan data dan informasi	100%

No.	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja	Target
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kecukupan sarana untuk administrasi perkantoran	100%
		Persentase kecukupan sarana dan prasarana untuk aparatur	100%
		Persentase kecukupan kelengkapan disiplin aparatur	100%
		Persentase terpenuhinya dokumen keuangan	100%

Tabel 2.5.

Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
1			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	579.840.000	579.840.000	660.517.079	
	1		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	579.840.000	579.840.000	660.517.079	
		1	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	579.840.000	579.840.000	660.517.079	
			Perbaikan Talud di Surakarta	579.840.000	579.840.000	455.517.079	(APBD)
			Pembangunan Talud di Kedung Jumbleng	-	-	205.000.000	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
2			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	-	225.195.000	
	2		Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota	-	-	225.195.000	
		2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	-	-	225.195.000	
			Penyusunan DED Penambahan Jaringan Air Minum Wosusokas	-	-	106.500.000	(APBD)
			Pendataan dan Pelaporan SPM Air Minum Kota Surakarta	-	-	20.300.000	(APBD)
			Penyusunan DED Penambahan Jaringan Air Minum Wilayah Selatan	-	-	98.395.000	(APBD)
3			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	-	17.650.000	
	3		Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota	-	-	17.650.000	
		3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah	-	-	17.650.000	

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				
			Pendataan dan Pelaporan SPM Air Limbah Kota Surakarta			17.650.000	(APBD)
4			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	25.461.940.800	25.392.250.321	21.875.901.581	
	4		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	25.461.940.800	25.392.250.321	21.875.901.581	
		4	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	15.435.266.600	15.435.266.600	11.107.159.574	
			Pembangunan Saluran Jl. MT. Haryono	2.644.357.000	2.644.357.000	1.852.178.437	(APBD)
			Peningkatan Saluran Jl. Bromo dan Kawasan Sekitarnya	830.580.000	830.580.000	621.171.335	(APBD)
			Peningkatan Saluran Jl. Kebangkitan Nasional	3.495.000.000	3.495.000.000	2.664.672.918	(APBD)
			Perencanaan Penuntasan Drainase Kawasan Notosuman dan Jl. Moh. Yamin	102.420.000	102.420.000	102.000.000	(APBD)
			Pembangunan Saluran Drainase Primer Kawasan Sumber	3.157.000.000	3.157.000.000	2.246.609.573	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			Pembangunan Saluran Jl. S. Parman dan Kawasan Sekitarnya	5.205.909.600	5.205.909.600	3.620.527.311	(APBD)
		5	Operasi Pemeliharaan Sistem Drainase	10.026.674.200	9.956.983.721	10.768.742.007	
			Belanja Alat Berat Spider Backhoe	6.007.268.000	-	-	(APBD)
			Belanja Alat Pendukung (Alat Berat) Spyder Excavator	-	6.002.975.000	6.006.875.000	(APBD)
			Belanja Pengadaan Hydraulic Jack Self loader dan Perbaikan Loose Bak	-	201.405.000	201.405.000	(APBD)
			Belanja Pengadaan Truk Chasis	-	391.575.000	391.965.000	(APBD)
			Belanja Alat Berat Mini Excavator	1.392.732.000	796.454.000	798.836.000	(APBD)
			Pengadaan Truck Pengangkut Sampah	-	-	752.322.000	(APBD)
			Perbaikan Saluran Primer Perkotaan	606.840.000	604.408.800	453.739.686	(APBD)
			Perbaikan Saluran Sekunder Perkotaan	606.840.000	604.408.800	604.688.800	(APBD)
			Belanja BBM dan Pelumas	251.535.200	206.650.000	210.650.000	(APBD)
			Perbaikan Kerusakan Darurat Saluran	199.021.500	198.517.500	198.517.500	(APBD)
			Perbaikan Kerusakan Darurat Saluran (Lanjutan)	-	-	203.542.519	(APBD)
			Pemeliharaan Pintu Air dan Rumah Pompa	199.021.500	198.517.500	197.390.000	(APBD)
			Pemeliharaan Saluran	195.021.500	194.517.500	193.390.000	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			Perengkapan Pendukung Operasional Pembersihan Saluran	101.825.000	101.450.000	101.450.000	(APBD)
			Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang Mekanikal dan Accu	101.825.000	101.450.000	101.728.000	(APBD)
			Belanja Pakaian Kerja Lapangan	71.825.000	71.450.000	71.728.000	(APBD)
			BBM Alat Berat	51.000.000	38.700.000	38.700.000	(APBD)
			Pemeliharaan dan Pembelian Suku Cadang Elektrikal	51.825.000	64.170.400	101.422.800	(APBD)
			Pemeliharaan Saluran Air	190.094.500	180.334.221	140.391.702	(APBD)
5			Program Penataan Bangunan Gedung	200.000.000	193.582.042	914.820.550	
	5		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	200.000.000	193.582.042	757.020.550	
		6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten / Kota	200.000.000	193.582.042	757.020.550	

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			Penyusunan DED Pelestarian Benteng Vastenburg	106.000.000	105.582.042	105.594.550	(APBD)
			Studi Teknis Arkeologi Pelestarian Benteng Vastenburg	88.000.000	88.000.000	88.396.000	(APBD)
			Pemeliharaan Pagar Masjid Agung Surakarta	-	-	226.650.000	(APBD)
			Pemeliharaan Gapura PB X	-	-	226.660.000	(APBD)
			Penyusunan DED Gapura Koridor Ndalem Joyokusuman	6.000.000	-	54.420.000	(APBD)
			Studi Teknis Arkeologi Pelestarian Situd Astana Oetara Kel. Nusukan	-	-	55.300.000	(APBD)
		7	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	-	-	157.800.000	
			Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	-	-	157.800.000	(APBD)
6			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	7.683.118.702	7.683.118.702	7.949.557.233	
	6		Penataan Bangunan dan Lingkungan	7.683.118.702	7.683.118.702	7.949.557.233	
		8	Penataan Bangunan dan Lingkungan	7.683.118.702	7.683.118.702	7.949.557.233	
			Penyusunan FS Gedung Convention Center	260.796.000	259.470.000	259.470.000	(APBD)
			Penataan Koridor Jl. Juanda Tahap 2	7.327.322.702	7.330.508.702	5.825.432.233	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			Penataan Kawasan Strategis Kota Surakarta	-	-	16.515.000	(Pendampingan APBN)
			Penyusunan Andalali Kawasan Balekambang	-	-	87.500.000	(Pendampingan APBN)
			Penyusunan Andalalin Koridor Jalan Gatot Subroto - Jalan Diponegoro (ngarsopuro)	-	-	87.500.000	(Pendampingan APBN)
			Penyusunan UKL UPL Penataan Koridor Jl. Juanda	50.000.000	49.580.000	49.580.000	(APBD)
			Ongkos Bongkar Angkut Penataan Koridor Jl. Juanda Tahap 2	30.000.000	15.000.000	15.000.000	(APBD)
			Pengurusan BPN Penataan Koridor Jl. Juanda Tahap 2	15.000.000	3.000.000	3.000.000	(APBD)
			Jaringan Listrik Kawasan Ekonomi Kreatif Jayengan	-	15.000.000	15.000.000	(APBD)
			Jaringan Listrik Ke PJU Kawasan Ekonomi Kreatif Jayengan	-	-	5.000.000	(APBD)
			Belanja Peralatan Keselamatan Kerja	-	10.560.000	10.560.000	(APBD)
			Appraisal Konsultan Koridor Jalan Juanda	-	-	25.000.000	(APBD)
			Koridor Jalan Juanda	-	-	1.550.000.000	(APBD)
7			Program Penyelenggaraan Jalan	61.423.949.700	2.649.526.633	2.267.230.009	

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
	7		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.423.949.700	62.649.526.633	62.267.230.009	
			Pembangunan Jalan	49.993.670.000	44.776.527.732	42.109.455.508	
			Peningkatan Jalan Joko Tingkir	-	15.000.000.000	15.000.000.000	(Bantuan Keuangan Provinsi)
				2.664.779.000	-	-	(DAK)
				100.000.000	125.112.781	125.112.781	(APBD Pendamping an DAK)
				-	150.000.000	150.000.000	(APBD Pendamping an Bankeu)
				15.175.112.781	-	-	(APBD)
			Masterplan Jaringan Jalan	1.000.000.000	998.066.827	997.006.827	(APBD)
			Peningkatan Jalan Duwet Ruas 127	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	(Bantuan Keuangan Propinsi)
			Peningkatan Jalan Duwet Ruas 127	200.000.000	200.000.000	200.000.000	(APBD Pendamping an Bankeu)
			Peningkatan Jalan Perintis Kemerdekaan	5.250.000.000	5.250.000.000	3.958.527.358	(APBD)
			Peningkatan Jalan Juanda	5.075.000.000	5.075.000.000	6.960.800.778	(APBD)
			Penataan Koridor Jl. Ki Hajar Dewantoro (Lanjutan)	4.645.000.000	4.645.000.000	3.417.870.526	(APBD)
			Peningkatan Jalan Jaya Wijaya	3.662.668.781	125.112.781	125.112.781	(APBD Pendamping an DAK)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			Penataan Kawasan Simpang Juanda Jurug (Lanjutan)	2.625.000.000	2.625.000.000	74.778.114	(APBD)
			Pengadaan Tanah Persil Eks-Saripetojo	561.000.000	558.250.000	640.843.112	(APBD)
			Peningkatan Jalan Kyai Mojo (APBD)	349.774.438	-	-	(APBD)
			Survey Kondisi Jalan	336.487.000	9.847.343	7.597.343	(APBD Pendamping DAK)
			Survey Kondisi Jembatan	238.848.000	5.138.000	5.138.000	(APBD)
			Peningkatan Jalan Brigjend Sudiarto	100.000.000	-	-	(APBD)
			Peningkatan Jalan Setia Budi	-	2.000.000.000	2.000.000.000	(APBD)
			Perencana DED Peningkatan Jalan MT Haryono	-	-	111.556.790	(APBD)
			Perencana DED Peningkatan Jalan Kahar Muzakir	-	-	111.554.308	(APBD)
			Belanja Jasa Konsultansi Perencana DED Peningkatan Jalan Surya	-	-	111.556.790	(APBD)
			Appraisal tanah	-	-	2.000.000	(APBD)
			Perencanaan DED Peningkatan Jalan Dr. Radjiman	-	-	100.000.000	(APBD)
			Aspal Asbuton	10.000.000	10.000.000	10.000.000	(APBD)
		9	Rekonstruksi Jalan	-	2.664.779.000	2.664.779.000	

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			Peningkatan Jalan Joko Tingkir	-	2.664.779.000	2.664.779.000	(DAK)
		10	Rehabilitasi Jalan	2.950.000.000	2.940.133.295	2.936.688.895	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan	2.000.000.000	1.995464.095	1.994.315.895	(APBD)
			Pemeliharaan Rutin/berkala Citywalk dan Pedestrian	750.000.000	746.768.200	745.620.000	(APBD)
			Leger Jalan	200.000.000	197.901.000	196.753.000	(APBD)
		11	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	3.792.556.000	6.005.776.000	
			Peningkatan Jalan Jaya Wijaya	-	3.474.506.000	3.474.506.000	(DAK)
			Perjalanan Dinas	-	63.050.000	63.050.000	(DAK)
			Survey Kondisi Jalan	-	125.000.000	125.000.000	(DAK)
			Survey Kondisi Jembatan	-	130.000.000	130.000.000	(DAK)
			Aspal Asbuton	-	-	199.993.500	(APBD)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan (Tahap II)	-	-	1.414.376.500	(APBD)
			Penyusunan Masterplan Ducting Utilitas	-	-	598.850.000	(APBD)
		12	Pembangunan Jembatan	7.025.000.000	7.025.000.000	7.100.000.000	
			Pembangunan Jembatan Ketandan	3.990.751.000	3.990.751.000	4.065.751.000	(APBD)
			Pembangunan Jembatan Jonasan	2.925.000.000	2.925.000.000	2.925.000.000	(APBD)
			DED Pembangunan Jembatan Kyai Mojo	109.249.000	109.249.000	109.249.000	(APBD)
		13	Rehabilitasi Jembatan	1.455.279.700	1.450.530.606	1.450.530.606	

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			Rehabilitasi Jembatan Pucang Sawit	625.000.000	623.679.970	623.679.970	(APBD)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Kota	614.779.700	611.728.846	747.228.846	(APBD)
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Jembatan Eco JPO Gladag Panti Husada	135.500.000	135.500.000	-	(APBD)
			Belanja Jasa Konsultansi Pelaporan UKL - UPL Underpass Transito	80.000.000	79.621.790	79.621.790	(APBD)
8			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	100.000.000	76.130.620	142.421.810	
	8		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	76.130.620	54.321.810	
		14	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	76.130.620	54.321.810	
			Pelatihan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi	100.000.000	76.130.620	54.321.810	(APBD)
	9		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	88.100.000	
		15	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	-	-	88.100.000	
			Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan	-	-	88.100.000	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
9			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	402.000.000	871.499.193	766.358.971	
	10		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	721.124.594	700.007.572	
		16	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten / Kota	100.000.000	62.797.959	648.114.737	
			Penyusunan Peta Tematik	50.000.000	33.203.085	29.074.035	(APBD)
			Koordinasi dan Konsultasi Teknis	7.100.000	6.949.730	6.409.730	(APBD)
			workshop/lokakarya/seminar koordinasi dan konsultasi Teknis	42.900.000	33.025.000	30.775.000	(APBD)
			Pengadaan Peta Dasar dan Peta Tematik Skala 1:5000	-	-	21.855.972	(APBD)
			Pekerjaan Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan BWP I	-	294.810.072	-	(APBD)
			Pekerjaan Penyusunan Dokumen RDTR Kawasan BWP II	-	294.810.072	-	(APBD)
			Jasa pembuatan Peta	-	-	560.000.000	(APBD)
		17	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang	70.000.000	58.326.635	51.892.835	
			Belanja Pengadaan Pesawat Drone	39.603.000	39.603.000	39.603.000	(APBD)
			Rakor Fasilitasi peningkatan peran serta	17.000.000	11.833.800	7.500.000	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang				
			Forum Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	13.397.000	6.889.835	4.789.835	(APBD)
	11		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	232.000.000	150.374.599	66.351.399	
		18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	232.000.000	150.374.599	66.351.399	
			Pengawasan Pemanfaatan Ruang	46.400.000	26.173.400	14.670.000	(APBD)
			Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	22.100.000	20.394.370	12.977.770	(APBD)
			workshop/lokakarya/ seminar Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	37.900.000	24.100.000	21.400.000	(APBD)
			Kegiatan Monitoring Pemanfaatan Ruang	27.075.000	21.995.229	9.803.629	(APBD)
			Rakor Monitoring Pemanfaatan Ruang	84.925.000	43.450.000	-	(APBD)
			Rakor Koordinasi Pengawasan Pemanfaatan Ruang	13.600.000	14.261.600	7.500.000	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
10			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	39.536.321.710	39.491.162.703	46.240.448.206	
	12		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	39.536.321.710	39.491.162.703	46.240.448.206	
		19	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	39.536.321.710	39.491.162.703	46.240.448.206	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	39.536.321.710	39.491.162.703	46.240.448.206	(APBD)
11			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15.215.837.750	87.152.984	15.326.733.742	
	13		Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	87.152.984	111.462.984	
		20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	87.152.984	111.462.984	(APBD)
	14		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.261.339.750	9.377.026.660	9.396.785.210	
		21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.231.240.890	9.356.373.313	9.379.307.863	(APBD)
		22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme steran SKPD	30.098.860	20.653.347	17.477.347	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
	15		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	49.590.000	49.590.000	
		24	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	49.590.000	49.590.000	(APBD)
	16		Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.998.000	642.881.643	798.628.643	
		25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	(APBD)
		26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.993.000	203.968.220	266.968.220	(APBD)
		27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.005.000	33.003.000	22.000.000	(APBD)
		28	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.000.000	19.550.000	19.550.000	(APBD)
		29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.000.000	6.000.000	6.000.000	(APBD)
		30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	175.000.000	78.750.000	(APBD)
		31	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200.000.000	195.360.423	395.360.423	(APBD)
	17		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.500.000	162.110.000	112.110.000	
		32	Pengadaan Mebel	142.500.000	37.110.000	37.110.000	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
		33	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	125.000.000	75.000.000	(APBD)
	18		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.291.000.000	3.289.120.000	3.638.504.000	
		34	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.500.000	(APBD)
		35	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.000.000	313.000.000	313.000.000	(APBD)
		36	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	30.000.000	(APBD)
		37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.945.000.000	2.943.120.000	3.292.004.000	(APBD)
	19		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.000.000	1.159.652.905	1.219.652.905	
		38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.000.000	56.000.000	56.000.000	(APBD)
		39	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	8.000.000	8.000.000	(APBD)
		40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320.000.000	316.007.060	316.007.060	(APBD)
		41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	15.000.000	(APBD)

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
		42	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	950.000.000	764.645.845	824.645.845	(APBD)
12			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	125.000.000	79.268.797	53.957.397	
	20		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	125.000.000	79.268.797	53.957.397	
		43	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	125.000.000	79.268.797	53.957.397	
			Forum TKPRD	74.720.000	34.488.797	19.227.397	(APBD)
			workshop/lokakarya/ seminar Forum TKPRD	32.100.000	26.600.000	16.550.000	(APBD)
			Pokja Perencana Tata Ruang	4.620.000	4.620.000	4.620.000	(APBD)
			Tm Pengarah Kegiatan TKPRD	6.420.000	6.420.000	6.420.000	(APBD)
			Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	4.620.000	4.620.000	4.620.000	(APBD)
			Kesekretariatan	2.520.000	2.520.000	2.520.000	(APBD)
13			Program Perencanaan, Pengendalian Dan	175.000.000	126.132.952	119.114.152	

No.			Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Anggaran			Keterangan
Prog	Keg	Sub		Sebelum	Rasionalisasi	Sesudah	
			Evaluasi Pembangunan Daerah				
	21		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	70.000.000	47.489.850	47.084.550	
		44	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	25.000.000	23.255.060	26.150.060	(APBD)
		45	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	20.000.000	6.824.915	6.824.915	(APBD)
		46	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	17.409.875	14.109.575	(APBD)
	22		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	105.000.000	78.643.102	72.029.602	
		47	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	105.000.000	78.643.102	72.029.602	(APBD)
Total				150.903.008.662	156.559.905.730	140.109.309.464	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2021

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

1. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terhadap RPJMD Tahun 2016-2021

Tabel 3.1

*Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016-2021 terhadap RPJMD Tahun 2016-2021
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta*

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi										
1	Infrastuktur Kota dalam kondisi baik	%	77,79	77,50	79,77	79,77	81,95	82,49	83,94	83,67	85,61	85,47	87,61	87,95
2	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	75,59	78,00	78,54	80,30	82,09	82,3	85,05	84,34	87,05	85,66	90,05	88,64
3	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	86,00	87,50	87,00	87,72	88,00	88,2	89,00	89,47	90,00	89,47	91	92,96
4	Jumlah Titik lampu PJU	unit	-	-	650	650	700	700	750	750	800	800	850	850
5	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana Kebinamargaan	%	82	82	84	84	87	86	90	72	93	72,22	95	72,22

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi								
6	Persentase panjang drainase/ saluran pembuangan air dalam kondisi baik	%	71,77	70,00	73,77	73,77	75,77	76,96	77,7	77,19	79,7	81,3	92,17	82,26
7	Persentase Turap/Bronjong/Talud dalam Kondisi Baik Lingkup Kewenangan Kota	m	-	-	37847	19337,44	39830	37036,29	40185	39947,08	41252	41371,9	42595,18	44253,40
8	Persentase Wilayah Bebas Banjir dan Genangan	%	-	90,25	94	93,55	96	94,3	97	95,32	98	96,3	99	96,40
9	Persentase penduduk berakses air minum.	%	65	65	67	67	70	70	85	84,99	100	94,65	100	94,57
10	Persentase penduduk dengan akses terhadap air limbah.	%	85	85	87	87	90	91,96	95	86,54	100	96,09	97,20	97,20
11	Persentase tersedianya Prasarana Umum di Kluster Ekonomi Kreatif	%	8	8	12	12	16	12	20	20	24	20	28	-
12	Persentase ruang publik yang ditata	%	-	-	26,32	26,59	67,81	97,65	71,39	98	100	98,47	100	98,48
13	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	42,02	41,89	47,67	41,92	50,58	51,74	53,49	54,57	56,4	57,20	59,3	65,10
14	Persentase Wilayah yang termonitoring	%	-	-	20,00	20	40,00	40,00	60,00	60,00	80,00	60,00	100	60,00
15	Persentase Kawasan yang memiliki RTRK/RTBL	%	-	-	19,4	19,4	27,7	27,7	63,8	39,30	88,8	42,4	100	50
16	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kota Beserta rencana Rincinya Melalui Peta Analog dan Digital	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-

No	Indikator Kinerja	Satuan	2016		2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Realisasi										
18	Terlayannya penjarangan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan program pemanfaatan ruang	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
19	Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja	%	100	-	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-
20	Persentase Kesesuaian IMB dengan Implementasi	%	-	-	40	-	40	-	40	-	40	45,96	40	-
21	Persentase Kesesuaian KRK dengan Implementasi KRK	%	-	-	40	-	40	-	40	-	40	60,92	40	-
22	Persentase Bangunan Pada Masing-masing Kelurahan yang terdata	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	37,04	100	37,04
23	Persentase pemanfaatan lahan Pada masing-masing Kecamatan yang Terdata	%	-	-	100	-	100	-	100	-	100	60	100	60

2. Target dan Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021 terhadap RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 3.2

*Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 terhadap RPJMD Tahun 2021-2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Akhir Renstra 2021-2026	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	%	87,05%	85,66%	98,40%	90,05%	88,64%	98,43%	93,05%	95,26%
2	Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik	%	90%	89,47%	99,41%	91 %	92,96%	102,15%	94%	98,89%
3	Persentase Panjang Drainase Kondisi Baik	%	79,7%	81,30%	102,01%	81,3 %	82,26%	101,18%	89,25%	92,17%
4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga	%	100%	94,65%	94,65%	100 %	94,57%	94,57%	100%	94,57%
5	Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	100%	96,09%	96,09%	100 %	97,20%	97,20%	100%	97,20%
6	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di	%	98%	96,30 %	98,27%	96,30 %	96,40%	100,10%	98,17%	98,19%

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Akhir Renstra 2021-2026	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
	Wilayah Sungai kewenangan kabupaten/kota									
7	Rasio Kepatuhan IMB	%	-	35,97%	-	36 %	36%	100%	45%	80%
8	Persentase kawasan/lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	-	-	-	9 %	9 %	100%	54%	16,67%
9	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	-	-	-	16,67 %	15%	89,98%	100%	15%
10	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	-	-	-	100 %	100 %	100 %	100%	100%
11	Nilai PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	nilai	-	18,23	-	18,3	18,38	100,44%	18,8	95,73%
Rata-rata Capaian Kinerja			98,14%			98,55%			80,33%	

Berdasarkan capaian kinerja yang tertera pada tabel 3.2, Capaian Kinerja Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tergolong dalam predikat **sangat berhasil** ($n > 85\%$) dengan presentase rata-rata capaian **98,55%**. Pada Capaian Kinerja 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 0,36% dibanding capaian tahun 2020 (98,14%) seperti yang terlihat pada grafik capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2016-2021 berikut;



Sumber Data: LkJP DPUPR 2016-2021

3. Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terhadap RPJMD Tahun 2021-2026

Tabel 3.3

*Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 terhadap RPJMD 2021-2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta*

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2021			Akhir Renstra 2021-2026	
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Capaian (%)
1	Persentase Infrastruktur Kota Kondisi Baik	%	87,61%	87,95%	100,39%	92,10%	95,49%
2	Cakupan Layanan Air Bersih	%	100 %	94,57%	94,57%	100%	94,57%
3	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100 %	97,20%	97,20%	100%	97,20%

4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terhadap target RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026

Pada dasarnya indikator target yang terdapat pada RPJMD 2016-2021 dan indikator target yang terdapat pada RPJMD 2021-2026 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki definisi operasional yang sama. Hanya saja dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan kembali dengan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya telah dengan jelas mengatur masing-masing urusan.

Dalam hal keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh banyak faktor diantaranya:

- a. Sumber Daya ASN
- b. Sarana Prasarana Pendukung kegiatan fisik infrastruktur yang tersedia
- c. Adanya sumber dana lain selain APBD, yaitu Dana Alokasi Khusus, Bantuan Gubernur, dan APBD Provinsi.
- d. Adanya *stakeholder* dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung terlaksananya capaian kinerja
- e. Terkait masa pandemi covid-19, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2021 memuat perubahan peraturan yang berbunyi: "Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat."

Sedangkan kendala yang dihadapi dalam mencapai target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diantaranya:

- a. Adanya Recofusing Anggaran akibat dari adanya Covid-19 yang masih menjadi dampak berkepanjangan terhadap kondisi keuangan daerah.

- b. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
- c. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.
- d. Kondisi eksisting bangunan dan ketersediaan lahan yang masih sulit ditangani dan menghambat proses penyelenggaraan jalan.
- e. Keberadaan jaringan air minum, Jaringan Kabel Listrik, Jaringan Telekomunikasi (Fiber Optik), vegetasi yang tumpang tindih dengan rencana penyelenggaraan jalan maupun pengelolaan saluran drainase karena penyusunan masterplan jaringan jalan yang akan menjadi pedoman masih dalam proses.
- f. Faktor Cuaca yang mempengaruhi jalannya penyelesaian pekerjaan.
- g. Adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berpengaruh pada kegiatan fisik/pekerjaan konstruksi yang harus tetap berjalan namun dengan jumlah personil terbatas.
- h. Umur konstruksi yang masih banyak membutuhkan rehabilitasi

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua, yaitu efisiensi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia. Efisiensi anggaran merupakan bagaimana memanfaatkan anggaran sebaik mungkin agar dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Anggaran} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi anggaran}}{\text{Target anggaran}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2021 realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta adalah Rp 140.109.309.464,00, sementara target anggaran yaitu Rp 156.559.905.730,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi

anggaran adalah 10.51%. Adanya efisiensi anggaran ini tidak mengurangi output prioritas yang ditargetkan dan dapat memberikan dampak serta manfaat bagi masyarakat.

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu unsur penting dalam pelaksanaan manajemen organisasi pemerintahan. Sumber daya tersebut memegang peran utama dalam menggerakkan dan menentukan keberhasilan organisasi pemerintah untuk mencapai target atau sasarannya. Terutama dalam rangka mewujudkan *good governance*, organisasi harus didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan berkompoten. Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan *stakeholder* dalam pengelolaan kegiatan seperti dukungan sumber daya manusia yang berkinerja baik, penggunaan jasa pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan tenaga ahli dari perguruan tinggi.

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta terhadap target RPJMD Tahun 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2021-2026
Infrastruktur Kota Kondisi Baik

Luas wilayah administrasi Daerah Kota Surakarta kurang lebih 4.672 (empat ribu enam ratus tujuh puluh dua) hektar atau kurang lebih 46,72 Km², yang terbagi menjadi 5 kecamatan diantaranya ; Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Jebres, dan Kecamatan Banjarsari (Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021-2041) dimana kurang lebih 24,87% dari luas wilayah Kota Surakarta yaitu 1.162 hektar merupakan Kawasan Perdagangan dan Jasa. Keberhasilan kegiatan perdagangan dan jasa tidak luput dari dukungan infrastruktur yang memperlancar konektivitas antar wilayah atau memperlancar proses distribusi.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, bahwa definisi infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Sedangkan dalam ilmu ekonomi, arti infrastruktur merupakan suatu wujud *public capital* (modal publik) sebagai investasi yang dilakukan pemerintah. Dimana wujud

public capital tersebut terdiri atas jalan, jembatan, dan sistem saluran pembuangan (Mankiw, 2003).

Pengembangan infrastruktur yang berkualitas, merata, dan memadai merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan karena mendorong konektivitas antar wilayah atau mendukung kelancaran distribusi sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas sosial lainnya. Kualitas infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan daya tarik dan daya saing kota sehingga mengangkat daya saing ekonomi kota.

Infrastruktur Kota Kondisi Baik yang terdiri dari beberapa komponen indikator yaitu; Tingkat Kemantapan Jalan, Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik, dan Persentase Panjang Drainase Kondisi Baik telah dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta dalam mendukung keberhasilan pembangunan sebesar 87,95% serta didukung capaian indikator-indikator kinerja infrastruktur lainnya. Dimana capaian indikator tersebut melebihi target tahun 2021 yaitu sebesar 87,61% sehingga defisiensi capaiannya terhadap target infrastruktur kota kondisi baik tahun 2021 mencapai 100,39%.

Program-program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendukung Infrastruktur Kota Kondisi Baik diantaranya;

a. Penyelenggaraan Jalan Kota/Kabupaten



Gambar 3.1
Peningkatan Jalan Joko Tingkir



Gambar 3.2
Peningkatan Jalan Duwet ruas 127



Gambar 3.3
Peningkatan Jalan Perintis Kemerdekaan



Gambar 3.4
Peningkatan Jalan Ki Hajar Dewantoro



Gambar 3.5
Peningkatan Jalan Jaya Wijaya



Gambar 3.6
Peningkatan Jalan Setia Budi



Gambar 3.7
Peningkatan Jalan Juanda



Gambar 3.8
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan



Gambar 3.9
Pembangunan Jembatan Ketandan



Gambar 3.10
Pembangunan Jembatan Jonasan

b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase



Gambar 3.11
Pembangunan Saluran Drainase Primer Sumber



Gambar 3.12
Pembangunan Talud Kali Makam Bergolo



Gambar 3.13
Pembangunan Talud Kedung Jumbleng



Gambar 3.14
Perbaikan Talud Kali Toklo



Gambar 3.15
Pembangunan Talud Saluran Stadion Mini



Gambar 3.16
Pembangunan Saluran Jl. S. Parman dan Kawasan Sekitarnya



Gambar 3.17
Peningkatan Saluran Jl. Kebangkitan Nasional



Gambar 3.18
Peningkatan Saluran Jl. Bromo dan Kawasan sekitarnya



Gambar 3.19
Pembangunan Saluran Jl. MT. Haryono



Gambar 3.20
Normalisasi Saluran

Cakupan Layanan Air Bersih

Permasalahan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung karakter Kota Budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dapat dilakukan upaya pencapaiannya melalui misi 3 Walikota Surakarta dengan misi 3 yaitu Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pariwisata dan pemajuan kebudayaan berkelanjutan, dan salah satu indikator keberhasilannya adalah Cakupan Layanan Air Bersih. Cakupan Layanan Air bersih juga menjadi salah satu sub urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Pada capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021, Cakupan Layanan Air Bersih dengan Indikator Kinerja Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga, capaian ini mengalami penurunan yaitu 94,57% dengan penurunan sebesar 0,08% dari capaian tahun 2020 (94,65%), hal tersebut terutama disebabkan oleh faktor pembagi dalam formula indikator yaitu jumlah rumah tangga yang selalu mengalami perkembangan sehingga berubah jumlahnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dan seiring dengan komitmen untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/*SDG's*) yang menargetkan pencapaian akses air minum dan sanitasi aman mencapai

100%, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengalami beberapa kendala diantaranya :

- a. Terkendala kelembagaan (pengelolaan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD dan BUMD).
- b. Terkendala keterbatasan Anggaran
- c. Terkendala data dukung merupakan data komposit dan belum ada data pilah
- d. Terkendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum
- e. Untuk mencapai akses aman terkendala kondisi elevasi yg tidak memadai antara sumber air ke daerah layanan
- f. Terbatasnya ketersediaan sumber air permukaan
- g. Terjadinya kebocoran air karena faktor usia jaringan distribusi utama (Cokro Tulung); adanya prasarana air minum yang berada di luar wilayah administrasi Kota Surakarta.
- h. Pencemaran sumber air permukaan

Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Seperti halnya Cakupan Layanan Air Bersih, berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 29 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Surakarta dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Surakarta Tahun 2021-2026 serta tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026, Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik yang merupakan urusan PUPR juga menjadi salah satu Indikator Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta.

Komitmen untuk pemenuhan sarana dan prasaran dasar bagi penduduk miskin melalui perluasan jaringan air bersih, pengembangan perumahan terjangkau dan penciptaan lingkungan sehat yang menjadi salah satu strategi dalam penanggulangan kemiskinan menargetkan pencapaian kinerja untuk Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik hingga 100%, dimana pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta telah mencapai realisasi kinerja sebesar 97,20% yang lebih meningkat sebesar 1,14% dibanding capaian sebelumnya yaitu

96,06%. Meski demikian dalam pencapaiannya menuju 100% masih banyak menemui kendala diantaranya;

- a. Terkendala kelembagaan (pengelolaan yang dilaksanakan oleh beberapa OPD dan BUMD)
- b. Terkendala keterbatasan Anggaran
- c. Terkendala data dukung merupakan data komposit dan belum ada data pilah.
- d. Terkendala keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah
- e. Posisi Pipa lateral lebih tinggi dari daerah tangkapan sambungan rumah (sehingga tidak bisa disambungkan)
- f. Penolakan warga untuk melakukan sambungan sehingga dialihkan ke lokasi lain (merusak properti pribadi)

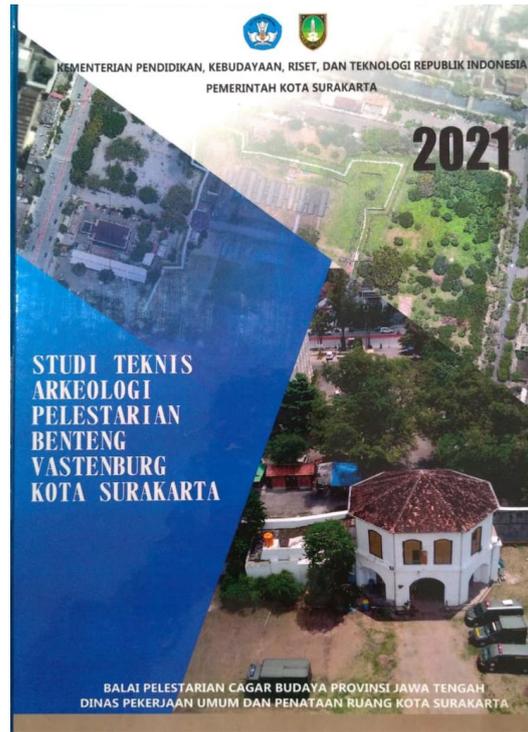
Dokumentasi Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021

Selain adanya pekerjaan fisik, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan nonfisik seperti halnya penyusunan DED, penyusunan dokumen kajian atau studi teknis, peta dasar dan tematik, penyusunan UKL-UPL, penyusunan dokumen SOP, SPP dan SKM, penyusunan masterplan jaringan jalan dan lain sebagainya yang menjadi dasar atau pedoman serta pendukung pelaksanaan beberapa kegiatan fisik yang ada.





Gambar 3.23
*Penyusunan Studi Teknis Arkeologi
 Pelestarian Situs Astana Oetara*



Gambar 3.24
*Penyusunan Studi Teknis Arkeologi
 Pelestarian Benteng Vastenburg*

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta, pada Tahun Anggaran 2021. Anggaran sebesar Rp. 156.559.905.730,- yang bersumber dari APBD, Bantuan Keuangan Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran adalah sebagai berikut :

Belanja Operasi : Rp. 71.337.040.281,-

Belanja Modal : Rp. 85.065.065.449,-

Tabel 3.4

*Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta
Tahun Anggaran 2021*

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)	%
Meningkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan dan meningkatnya kualitas drainase perkotaan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	61.423.949.700	62.267.230.009	52.282.030.746	83,96%
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	61.423.949.700	62.267.230.009	52.282.030.746	83,96%
	Pembangunan Jalan	49.993.670.000	42.109.455.508	34.484.124.603	81,89%
	Rekonstruksi Jalan	-	2.664.779.000	2.400.000.000	90,06%
	Rehabilitasi Jalan	2.950.000.000	2.936.688.895	2.886.908.724	98,30%
	Pemeliharaan Berkala Jalan	-	6.005.776.000	5.313.973.816	88,48%
	Pembangunan Jembatan	7.025.000.000	7.100.000.000	5.902.389.817	83,13%
	Rehabilitasi Jembatan	1.455.279.700	1.450.530.606	1.294.633.786	89,25%

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)	%
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	25.461.940.800	21.875.901.581	21.041.178.475	96,18%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.461.940.800	21.875.901.581	21.041.178.475	96,18%
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	15.435.266.600	11.107.159.574	11.029.199.500	99,30%
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	10.026.674.200	10.768.742.007	10.011.978.975	92,97%
Meningkatnya pemenuhan Kebutuhan Air Minum Bagi masyarakat	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	225.195.000	211.700.475	94,01%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	225.195.000	211.700.475	94,01%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	-	225.195.000	211.700.475	94,01%
Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	17.650.000	13.890.770	78,70%
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	17.650.000	13.890.770	78,70%

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)	%
pengolahan air limbah domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	17.650.000	13.890.770	78,70%
Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	579.840.000	660.517.079	629.511.750	95,31%
	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	579.840.000	660.517.079	629.511.750	95,31%
	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	579.840.000	660.517.079	629.511.750	95,31%
Meningkatnya penyelenggaraan bangunan gedung	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	200.000.000	914.820.550	760.002.546	83,08%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	200.000.000	914.820.550	760.002.546	83,08%
	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	-	157.800.000	108.376.460	68,68%
	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000	757.020.550	651.626.086	86,08%
Meningkatnya penyelenggaraan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	7.683.118.702	7.949.557.233	5.261.257.046	66,18%

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)	%
penantaan bangunan dan lingkungan	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	7.683.118.702	7.949.557.233	5.261.257.046	66,18%
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	7.683.118.702	7.949.557.233	5.261.257.046	66,18%
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	100.000.000	142.421.810	118.155.782	82,96%
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	54.321.810	31.674.847	58,31%
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100.000.000	54.321.810	31.674.847	58,31%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	88.100.000	86.480.935	98,16%
	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	-	88.100.000	86.480.935	98,16%
Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	402.000.000	766.358.971	723.839.750	94,45%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	170.000.000	700.007.572	663.946.800	94,85%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	100.000.000	648.114.737	613.127.000	94,60%
	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	70.000.000	51.892.835	50.819.800	97,93%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	232.000.000	66.351.399	59.892.950	90,27%

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)	%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	232.000.000	66.351.399	59.892.950	90,27%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	39.536.321.710	46.240.448.206	45.120.306.573	97,58%
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	39.536.321.710	46.240.448.206	45.120.306.573	97,58%
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	39.536.321.710	46.240.448.206	45.120.306.573	97,58%
Meningkatnya Kualitas dan Keefektifitasan Perencanaan dan Pencapaian Kinerja OPD agar Efektif dan Efisien	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	15.215.837.750	15.326.733.742	13.786.025.481	89,95%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	111.462.984	109.597.400	98,33%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90.000.000	111.462.984	109.597.400	98,33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.261.339.750	9.396.785.210	8.921.552.919	94,94%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.231.240.890	9.379.307.863	8.908.730.869	94,98%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.098.860	17.477.347	12.822.050	73,36%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000	49.590.000	48.825.000	98,46%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.000.000	49.590.000	48.825.000	98,46%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	859.998.000	798.628.643	767.605.010	96,12%

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)	%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	215.993.000	266.968.220	262.819.400	98,45%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.005.000	22.000.000	10.466.400	47,57%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.000.000	19.550.000	14.020.700	71,72%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000	6.000.000	5.340.000	89,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000	78.750.000	78.750.000	100,00%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	200.000.000	395.360.423	386.208.510	97,69%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.500.000	112.110.000	109.507.678	97,68%
	Pengadaan Mebel	142.500.000	37.110.000	37.110.000	100,00%
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	125.000.000	75.000.000	72.397.678	96,53%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.291.000.000	3.638.504.000	2.719.859.739	74,75%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.500.000	2.925.500	83,59%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	313.000.000	313.000.000	163.767.439	52,32%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	30.000.000	28.095.600	93,65%

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)	%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.945.000.000	3.292.004.000	2.525.071.200	76,70%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.346.000.000	1.219.652.905	1.109.077.735	90,93%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.000.000	56.000.000	29.066.400	51,90%
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000	8.000.000	7.970.000	99,63%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	320.000.000	316.007.060	258.018.450	81,65%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000	14.970.000	99,80%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	950.000.000	824.645.845	799.052.885	96,90%
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	175.000.000	119.114.152	113.650.920	95,41%
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	70.000.000	47.084.550	45.487.320	96,61%
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	25.000.000	26.150.060	25.440.000	97,28%
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	20.000.000	6.824.915	6.197.320	90,80%

SASARAN STRATEGIS	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		REALISASI KEUANGAN	
		SEBELUM	SESUDAH	(Rp)	%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	14.109.575	13.850.000	98,16%
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	105.000.000	72.029.602	68.163.600	94,63%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	105.000.000	72.029.602	68.163.600	94,63%
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	125.000.000	53.957.397	47.759.150	88,51%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	125.000.000	53.957.397	47.759.150	88,51%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	125.000.000	53.957.397	47.759.150	88,51%
	TOTAL	150.903.008.662	156.559.905.730	140.109.309.464	89,49%

Meskipun cukup baik, serapan capaian anggaran tahun 2021 mengalami penurunan dibanding tahun anggaran 2020 yaitu hanya sebesar 89,49%, sedangkan pada tahun anggaran 2020 mencapai 95,47%. Hal tersebut dapat terlihat pada grafik capaian anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021 seperti berikut;



Sumber Data: LkjiP DPUPR 2016-2021

Adapun faktor penyebab penyerapan anggaran yang tidak maksimal di tahun 2021, diantaranya;

- a. Nilai kontrak pada pekerjaan yang merupakan hasil dari penawaran yang dilakukan oleh pelaksana pekerjaan konstruksi, jauh dibawah pagu anggaran.
- b. Adanya pagu anggaran kegiatan yang diterima pada Triwulan ke IV sehingga penyerapannya tidak maksimal.
- c. Adanya lonjakan pandemi covid-19 di awal hingga pertengahan tahun yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan forum, pelatihan maupun bimbingan teknis yang berpengaruh pada penyerapan anggaran.
- d. Kebutuhan alat tulis kantor yang telah dianggarkan, dari beberapa kegiatan tertentu ada yang telah disediakan oleh pihak ketiga pelaksana pekerjaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021–2026, serta termuat dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021 merupakan pengukuran dan evaluasi kinerja untuk tahun terakhir Renstra DPUPR Tahun 2016–2021 sekaligus tahun pertama Renstra DPUPR Tahun 2021–2026.

Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta Tahun 2021 diukur dan diperoleh dari 9 sasaran strategis, 13 program, 22 kegiatan, 47 sub kegiatan yang didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBD, Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta tergolong dalam predikat **sangat berhasil** dalam capaian kinerja ($n > 85\%$) dengan presentase rata-rata capaian sebesar **98,50%** yang juga mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya, serta capaian anggaran sebesar 89,49% yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Meskipun tergolong sangat berhasil dalam capaian kinerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta mengalami beberapa kendala/hambatan yang menjadikan capaian kinerja pada beberapa kegiatan tertentu tidak mencapai targetnya dan menyebabkan penyerapan anggaran pada tahun 2021 menurun dibanding tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian diperlukan tindak lanjut dalam mengatasi masalah, serta sebagai strategi peningkatan kinerja agar kedepannya dapat lebih maksimal dalam pencapaian target. Strategi yang dapat dilaksanakan dalam peningkatan kinerja diantaranya:

1. Peningkatkan perencanaan prioritas pekerjaan, perencanaan *time schedule* dan perencanaan anggaran;
2. Peningkatan kualitas perencanaan lelang, baik dari segi waktu, kelengkapan dokumen maupun sumber daya;
3. Koordinasi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder terkait dan pembentukan tim kinerja yang berkualitas;
4. Monitoring dan evaluasi setiap kegiatan secara berkala;
5. Pengambilan dan perubahan kebijakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang segera dilakukan menyesuaikan perubahan situasi dan kondisi yang terjadi.